

## Daftar Bacaan

### Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Perusahaan Indonesia*", Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010.
- Agustinus Simanjuntak, "*Hukum Bisnis, Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum Dan Praktik Bisnis*", Depok, Rajawali Pers, 2018.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, "*seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*", Rajawali Pers, Jakarta, 1999.
- , "*Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*", Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Ahmad Yani, "*Seri hukum bisnis dan perseroan terbatas*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Alfin Sulaiman, "*Keuangan Negara pada Badan usaha Milik Negara dalam Prspektif Ilmu Hukum*", PT. Alumni, Bandung, 2011.
- Ali Rido, "*Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*", Alumni, Bandung, 2004.
- Arifin P. Soeria Atmadja, "*Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum*", Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- , "*Aktualisasi Hukum Keuangan Publik*", Mujahid Press, Bandung, 2014.
- Binoto Nadapdap, "*Hukum Perseroan Terbatas*", Permata Aksara, Jakarta, 2012.
- Bismar Nasution, "*Diktat Kuliah Hukum Untuk Pembangunan Ekonomi*", USU Press, Medan, 2019.
- Chidir Ali, "*Badan Hukum*", Alumni, Bandung, 2011.
- Encik Muhammad Fauzan, "*Hukum Tata negara Indonesia*", Setara Press, Malang, 2017.
- Freddy Haris dan Teddy Anggoro, "*Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi*", Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

- H.M.N. Purwosutjipto, sebagaimana dikutip dalam Ridwan Khairandy, *“Pengantar Hukum Dagang”*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2006.
- Hans Kelsen, *“Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif”*, Cetakan Ke VI, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2008.
- Hasbullah F. Sjawi, *“Direksi dan Pertanggungjawaban Korporasi”*, Kencana, Jakarta, 2015.
- , *“Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Hendra Setiawan Boen, *“Biaglala Business Judgement Rule”*, Tatanusa, Jakarta, 2008.
- Hernold Ferry Makawimbang, *“Kerugian Keuangan Negara”*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.
- I.G. Rai Widjaya, *“Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas”*, Megapoint, Jakarta, 1996.
- Lawrence M. Friedmann, *“The Legal System: A Social Science Perspective, (Soejono Soekanto terjemahan)”*, Nusamedia, Yogyakarta, 2011.
- M Yahya Harahap, *“Hukum Perseroan Terbatas”*, Cet. Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Munir Fuadi, *“Prinsip Business Judgement Rule”*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2008.
- Munir Fuady, *“Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia”*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Philipus M. Hadjon, *“Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi”*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Prasetio, *“Dilema BUMN Benturan Penerapan Business Judgement Rule (BJR) dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN”*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, 2014.
- Remi Sutan Syahdeni, *“Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan”*, Cetakan Keempat, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010.

- Roger LeRoy dan Gaylod A. Jentz, "*Buisness Law Today, Text and Cases*", (Antoni seregar terjemahan), Gramedia, Jakarta, 2018.
- Romli Atmasasmita, "*Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*", Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, 2010.
- Rony Andre Christian Naldo, dkk, "*Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Sebab Perbuatan Melawan Hukum Mengakibatkan Kerugian Lingkungan Hidup*", Nas Media Pustaka, Makassar, 2022.
- Satjipto Raharjo, "*Hukum Pembangunan Ekonomi*", Pustaka Yustisia, Jakarta, 2008.
- Sentosa Sembiring, "*Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*", CV Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Sri Redjeki Hartono, dikutip dalam buku Kurniawan, "*Hukum Perusahaan: Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*", Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Wahyu Kurniawan, "*Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan*", PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2012.
- Yahya Harahap, "*Hukum Peseroan Terbatas*", Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

### **Skripsi/Tesis**

- Ashar Maulana Religia, "Tanggung Jawab Direksi Dalam Hal Terjadi Kerugian Perseroan Terbatas Yang Modalnya Berasal Dari Kekayaan Negara Yang Dipisahkan". Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 2020.
- Christian Isal Sanggalangi, "*Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Terkait Pertanggung Jawaban Pidana, Studi Kasus Hotasi Nababan*". Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2016.
- Marifa Anandita Sari, "*Konsep Business Judgement Rule Pada Badan Usaha Milik Negara Studi Kasus Putusan No. 41 Pk/Pid.Sus/2015*", Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

## **Jurnal**

- Erman Rajagukguk, "*Pengelolaan Perusahaan Yang Baik: Tanggung Jawab Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi*", Jurnal Hukum Bisnis Vol. 26 No. 3, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2007.
- Henny Juliani, "*Pertanggungjawaban Direksi Bumn Terhadap Perbuatan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara*", Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 45 No. 4, Oktober, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2016.
- Jamin Ginting, "*Pengertian Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*", *Jurnal Law Review*, Vol. VI, No. 2, November, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, 2006.
- Rani Lestari, "*Konsistensi Penguatan Kedudukan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara Menurut Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Kaitannya Dengan Doktrin Business Judgement Rule*", *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Unpad Volume 1, Nomor 2, Juni, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2018.*
- Rumawi, "*Karakteristik Perseroan Terbatas Perorangan dalam Hukum Indonesia*", *Jurnal Hukum Bisnis Volume 12 Nomor 2, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2023.*
- Shigeo Desiputri Hadi, "*Prinsip Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi Bumn Yang Melakukan Tindakan Investasi Yang Mengakibatkan Kerugian*", *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Unpad Volume 4, Nomor 2, Juni, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2021.*
- Shinta Ikeyani Kusumawardani, "*Pengaturan Kewenangan, dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)*", *Jurnal Hukum Vol.2, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2012.*

## **Media Daring**

- Agnes Arianne, "*Dewan Direksi: Definisi, Jenis, Tugasnya dan Tanggungjawabnya*", <https://dailysocial.id/post/dewan-direksi-definisi-jenis-tugasnya-dan-tanggungjawabnya>, Online diakses pada 30 Mei 2024 pukul 23.44.
- Bahder Johan Nasution, "*Sejarah Perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia*", <https://www.neliti.com/publications/43226/sejarah->

*perkembangan-kekuasaan-kehakiman-di-indonesia*, Online Diakses pada Selasa 28 Mei 2024 pukul 14.37.

FND, “*Kekayaan BUMN Bukan Bagian Keuangan Negara*”<https://www.hukumonline.com/berita/a/kekayaan-bumn-bukan-bagian-keuangan-negara-lt50913e5b4d3a1/>, Online diakses pada 27 Maret 2024 pukul 23.00.

Hukum Online, “*Fatwa MA yang Menjadi Kontroversi*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/fatwa-ma-yang-menjadi-kontroversi-hol15556>, Online Diakses pada 28 Mei 2024 pukul 14.45.

Moch Dani Pratama Huzaini, “*Prinsip Fiduciary Duty dalam Pertanggungjawaban Direksi*”<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6337efc8c091b/prinsip-fiduciary-duty-dalam-pertanggungjawaban-direksi>, Online diakses pada 27 Maret 2024 pukul 22.50.

Ngadino, Agus dan Rumesten, Iza RS, “*Pengelolaan Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi*”, [eprints.unsri.ac.id/2277/1/agus\\_n\\_iza\\_05\\_2012](https://eprints.unsri.ac.id/2277/1/agus_n_iza_05_2012), Online diakses pada 30 Mei 2024 pukul 15.06.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan

Perseroan (Persero);

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; dan

Peraturan Menteri BUMN Kep-117/M.BU/2002 *jo* PER-01 /MBU/2011 Tentang

Penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik

Negara.